



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2344/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15630/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15630/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Belum Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk:

- 1) Lebih optimal melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi KOMDANAS;
- 2) Menginstruksikan kepada Panitera dan Panitera Muda Perdata Satuan Kerja lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga diantaranya dengan:
 - a) Melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi KOMDANAS;
 - b) Melakukan verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga yang diinput oleh Kasir;
- 3) Menginstruksikan kepada Kasir Keuangan Perkara Satuan Kerja:
 - a) Melakukan rekonsiliasi data dan saldo rekening RPL pada Aplikasi KOMDANAS secara periodik;

- b) Lebih cermat dan teliti dalam melakukan penginputan data biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam Aplikasi KOMDANAS sesuai dengan ketentuan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15630/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Ketua Pengadilan
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Belum Tertib, dengan ini memerintahkan Ketua Pengadilan Satuan Kerja terkait untuk:

- 1) Lebih optimal melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi KOMDANAS;
- 2) Menginstruksikan kepada Panitera dan Panitera Muda Perdata Satuan Kerja lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya proses dan uang titipan pihak ketiga diantaranya dengan:
 - a) Melakukan pengawasan atas laporan biaya proses dan uang titipan perkara pada Aplikasi KOMDANAS; dan
 - b) Melakukan verifikasi atas akurasi saldo biaya proses dan uang titipan pihak ketiga yang diinput oleh Kasir;
- 3) Menginstruksikan kepada Kasir Keuangan Perkara Satuan Kerja:
 - a) Melakukan rekonsiliasi data dan saldo rekening RPL pada Aplikasi KOMDANAS secara periodik; dan
 - b) Lebih cermat dan teliti dalam melakukan penginputan data biaya proses dan uang titipan pihak ketiga dalam Aplikasi KOMDANAS sesuai dengan ketentuan.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait; dan
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait.

D.1.d1)2)3)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

LAMPIRAN
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 15630/SEK/PW1.4/X/2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
2.	Pengadilan Agama Kendari
3.	Pengadilan Agama Pekanbaru
4.	Pengadilan Agama Bangkinang
5.	Pengadilan Negeri Sungguminasa
6.	Pengadilan Agama Pontianak
7.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
8.	Pengadilan Negeri Kendari
9.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih
10.	Pengadilan Agama Tembilahan
11.	Pengadilan Negeri Samarinda
12.	Pengadilan Agama Jember
13.	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
14.	Pengadilan Negeri Kotabumi
15.	Pengadilan Negeri Kuningan
16.	Pengadilan Negeri Waikabubak
17.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya
18.	Pengadilan Negeri Jeneponto
19.	Pengadilan Agama Selayar
20.	Pengadilan Agama Unaaha
21.	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa

No.	Nama Satuan Kerja
22.	Pengadilan Negeri Purwakarta
23.	Pengadilan Agama Cilegon
24.	Pengadilan Negeri Kotobaru
25.	Pengadilan Negeri Tanjung
26.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
27.	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
28.	Pengadilan Negeri Ternate
29.	Pengadilan Negeri Kupang
30.	Pengadilan Negeri Kediri
31.	Pengadilan Negeri Dumai
32.	Pengadilan Agama Sukadana
33.	Pengadilan Agama Sentani
34.	Pengadilan Negeri Namlea
35.	Pengadilan Tinggi Kupang
36.	Pengadilan Tinggi Manado
37.	Pengadilan Negeri Atambua
38.	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
39.	Pengadilan Negeri Kutacane
40.	Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

D.1.d1)2)3)



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN